

Pendidikan Politik dan Bela Negara Bagi Pemilih Milenial di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Pada Pilkada 2020 Ditengah Pandemi Covid-19

Dra. Siti Maryam, M.Si, Danis Tri Saputra Wahidin, S.IP., M.I.P
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta
UPNVJ, Jalan RS. Fatmawati No.1 – Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
sitimaryam@upnvj.ac.id, daniswahidin@upnvj.ac.id,

Abstrak

Partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Depok yang masih mencapai angka 50%-60% masih dapat dikatakan rendah jika dibandingkan dengan target partisipasi Pilkada 2020 sebesar 77,5%. Keadaan ini semakin diperburuk dengan pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi Covid-19. Pendidikan politik dan bela negara bagi pemilih milenial merupakan motivasi penting untuk membangun rasionalisasi dari urgensi pilkada 2020 di Kota Depok sehingga para pemilih pemula tersebut mau berpartisipasi dan meningkatkan angka partisipasi politik Kota Depok. Berdasarkan *pretest* pada 30 partisipan yang berasal dari 6 kelurahan berbeda, mayoritas responden sebanyak 60% masih khawatir mengikuti pilkada 2020 ditengah covid-19, kekhawatiran tersebut disebabkan oleh ketakutan pemilih milenial terkena covid-19 (60%), 30% menganggap pilkada lebih baik ditunda, 20% menganggap pilkada tidak penting, 20% menganggap kandidat yang ada tidak berperan dalam pembangunan Kota Depok dan sisanya sebanyak 30% menyatakan lainnya. Setelah diberikan pelatihan melalui *google meet* persepsi responden mengalami perubahan. 50% masih khawatir untuk mengikuti pilkada 2020, kekhawatiran tersebut disebabkan oleh ketakutan pemilih milenial terkena covid-19 sebanyak 50%, 20% menganggap pilkada lebih baik ditunda, 10% menganggap pilkada tidak penting, 10% menganggap kandidat yang ada tidak berperan dalam pembangunan Kota Depok dan 10% menyatakan lainnya.

Kata Kunci : *Pendidikan politik dan bela negara, Pilkada 2020, dan Peningkatan partisipasi pemilih pemula*

Abstract

Voter participation in the Depok City election which still reaches 50% -60% can still be said to be low when compared to the 2020 election target of 77.5%. This situation was further exacerbated by the implementation of regional elections in the the Covid-19 pandemic. Political and state defense education for millennial voters is an important motivation to build a rationalization of the urgency of the 2020 regional elections in Depok City so that these novice voters want to participate and increase the political participation rate of Depok City. Based on the pretest on 30 participants who came from 6 different urban villages, the majority of respondents as much as 60% were still worried about participating in the 2020 regional elections in the covid-19 pandemic, this concern was caused by the fear of millennial voters

being transmitted to covid-19 (60%), 30% thought the regional election was better off being postponed, 20% thought the pilkada was not important, 20% thought that the existing candidates did not play a role in the development of Depok City and the remaining 30% stated the other. After being given training through google meet, the respondents' perceptions changed. 50% are still worried about participating in the 2020 regional election, this concern is due to the fear of millennial voters being transmitted to Covid-19 as much as 50%, 20% think the regional election is better to be postponed, 10% think the regional election is not important, 10% think the existing candidates do not play a role in the development of Depok city and 10% stated others.

Keyword:

Political and state defense education, 2020 regional election, and the Milenial's political participation rate of Depok City

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pilkada 2020 di Kota Depok tidak mudah untuk dilakukan, Pada pilkada tahun 2005, 2010 dan 2015 partisipasi politik masyarakat tidak melebihi 60%. Angka partisipasi politik ini dapat dikatakan rendah jika dibandingkan dengan target partisipasi politik pada pilkada 2020 sebesar 77.5%. Rendahnya partisipasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya, kurangnya sosialisasi KPU sebagai penyelenggara, rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti pilkada karena menganggap pilkada tidak penting, serta kecewa dengan kinerja pemerintahan.

Rendahnya angka partisipasi politik di Kota Depok semakin diperparah dengan menyebarnya

pandemi covid-19. Berdasarkan hasil evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat pada 14-20 September 2020, Kota Depok merupakan salah satu dari lima daerah yang termasuk kategori *Zona Merah* bersama Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon. Keadaan ini mempengaruhi kondisi mental pemilih untuk berpartisipasi pada Pilkada 2020 di Kota Depok. Menurut Survei Politik Populi Center, animo masyarakat untuk mengikuti pilkada 2020 sebelum terjadinya pandemi mencapai 90%, namun kondisi ini telah menurunkan animo masyarakat untuk berpartisipasi.

Kebijakan pemerintah melaksanakan pilkada diatur dalam Perpu Nomor 2 tahun 2020 yang kemudian

diundangkan menjadi UU Nomor 6 tahun 2020 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dan kemungkinan untuk menunda kembali pilkada jika keadaan dianggap tidak kondusif.. Pelaksanaan Pilkada 2020 yang tidak lepas dari berbagai kontroversi antara menunda atau melanjutkan keduanya memiliki argumentasi yang kuat. *Pertama*, penundaan pilkada dengan alasan kesehatan masyarakat dan pencegahan masyarakat dari pembentukan klaster-klaster baru pada saat pemilihan kepala daerah. *Kedua*, pelaksanaan pilkada serentak dengan protokol kesehatan yang ketat karena penundaan pilkada akan mengganggu mekanisme demokrasi melalui proses penetapan PLT, kewenangan PLT yang terbatas dianggap memperlambat penanganan covid-19, selain itu, penundaan pilkada dianggap melemahkan pemulihan ekonomi dari ancaman resesi ekonomi yang berpotensi terjadi pada bulan Oktober 2020.

Meskipun tidak ada ketentuan yang mengatur tentang tingkat partisipasi minimal dalam sebuah pemilihan kepala daerah, partisipasi politik pada pilkada menjadi penting

dalam membaca legitimasi kekuasaan politik lokal, keadaan ini didorong oleh sistem demokrasi lokal dan nasional yang menganut sistem suara terbanyak.

Pentingnya partisipasi politik dapat dipahami melalui beberapa analisis, *pertama*, partisipasi mampu mencerminkan kualitas demokrasi, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam sebuah proses demokrasi maka kualitas demokrasi tersebut dapat dikatakan baik, karena demokrasi yang baik harus mengakomodasi tingkat kepercayaan masyarakat yang besar terhadap sistem yang berjalan. Kepercayaan ini tercermin melalui partisipasi politik. *Kedua*, partisipasi politik menandakan adanya kemauan kolektif untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan politik secara bersama-sama sehingga pembangunan lokal setelah pemilu dapat berjalan dengan baik. *Ketiga*, partisipasi politik juga merupakan kontrol masyarakat agar pilkada berjalan dengan baik sehingga terhindar dari berbagai kecurangan pilkada dan dapat menghasilkan kepala daerah yang bersih serta sesuai dengan harapan mayoritas masyarakat. *Keempat*, partisipasi politik juga menandakan

adanya kepuasan kolektif terhadap sistem yang sudah berjalan. Kelima, partisipasi politik juga menjadi indikator penting dari kemajuan politik sebuah negara, semakin maju sebuah negara maka semakin tinggi pula partisipasi politiknya.

Partisipasi politik didalam pilkada tentu saja tidak dapat hanya dipahami sebagai keikutsertaan masyarakat didalam pemilihan kepala daerah, Samuel P Huntington mengungkapkan bahwa partisipasi politik diantaranya terdiri dari (1) aktif di dalam kegiatan pemilihan, (2) Lobbying, (3) Kegiatan organisasi, (4) Mencari koneksi, (5) Tindakan kekerasan (violence). Namun didalam pengabdian ini, pemberdayaan difokuskan pada keikutsertaan masyarakat pada pemilihan kepala daerah sehingga partisipasinya dapat meningkat dari tahun sebelumnya.

Partisipasi politik tersebut dapat ditingkatkan melalui berbagai proses politik (1) pendidikan politik, (2) marketing politik melalui iklan di media elektronik maupun media sosial, (3) penguatan partai politik melalui aktivasi simpul-simpul jaringan massa dan (4) Arahan tokoh lokal kepada

masyarakat.

Namun, Partisipasi politik masyarakat yang demokratis harus terbentuk secara autonomis atau mandiri, sukarela dan tanpa paksaan sehingga masyarakat berpartisipasi dengan penuh kesadaran. Pendidikan politik merupakan salah satu metode paling efektif dalam upaya memotivasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Depok dalam pilkada 2020 khususnya pada kalangan milenial. Berdasarkan survei sosial dan ekonomi nasional yang dilaksanakan BPS pada tahun 2017, jumlah kalangan milenial di Indonesia berjumlah 33,75%, lebih tinggi dari generasi z yang berjumlah 29,23%, generasi x sebanyak 25,74%, dan generasi baby boom (veteran) sebanyak 11,27%.

Stafford dan Griffis (2008) menyatakan bahwa generasi milenial adalah populasi yang lahir antara tahun 1980 sampai dengan tahun 2000. Sehingga jika dipaparkan berdasarkan umurnya saat ini, kalangan milenial adalah mereka yang berumur 20 tahun-40 tahun. Sedangkan pemilih pemula menurut ketentuan KPU merupakan

pemilih yang baru saja menggunakan hak pilihnya, mereka biasanya adalah remaja yang berusia 17-21 tahun. Pemahaman ini menunjukkan bahwa tidak semua kalangan milenial adalah pemilih pemula, namun semua pemilih pemula sudah tentu pemilih milenial

Kegiatan pendidikan ini meliputi kajian dan diskusi tentang pentingnya pilkada 2020 di Kota Depok yang dilaksanakan di tengah pandemik, Bagaimana peta politik Kota Depok pada pilkada 2020, Relasi Pilkada Kota Depok tahun 2020 dengan akselerasi pembangunan Kota Depok, serta pendidikan bela negara berupa penumbuhan kembali rasa cinta terhadap tanah air melalui pilkada, menguatkan rasa perjuangan dan rela berkorban serta ikut serta membela negara dengan pendekatan lokalitas.

2. MASALAH

Masalah yang disajikan dalam tulisan ini adalah, bagaimana pendidikan politik dan bela negara disampaikan kepada masyarakat milenial Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok. Selain itu, tulisan ini

menjelaskan tentang bagaimana dampak pendidikan politik dan bela negara yang diampaikan kepada masyarakat milenial Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok terhadap partisipasinya pada pilkada 2020.

3. METODOLOGI

Metode campuran tetap digunakan dalam penulisan laporan ini (*mix method*) (Creswell: 2014), karena metode ini mampu menjelaskan secara komprehensif tentang deskripsi kegiatan dan dampaknya terhadap perubahan persepsi dan peningkatan animo peserta untuk berpartisipasi pada pilkada Kota Depok 2020 yang akan dilaksanakan pada bulan Desember. Data-data kuantitatif dikumpulkan dengan metode pretest dan posttest dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis univariat. Dimana data disajikan berdasarkan jumlah terbanyak untuk memperlihatkan persepsi dan perilaku responden pelatihan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pendidikan politik dan bela negara ini dilakukan secara online dengan menggunakan *google meet* pada 30 peserta yang merupakan perwakilan dari

6 kelurahan di Kecamatan Pancoran Mas yaitu 5 orang dari Kelurahan Pancoran Mas, 5 orang dari Kelurahan Depok, 5 orang dari Kelurahan Depok Jaya, 5 orang dari Kelurahan Rangkapan Jaya, 5 orang dari Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, dan 5 orang dari Kelurahan Mampang. Berdasarkan jenis kelaminnya, para peserta memiliki komposisi yang seimbang masing-masing 50%.

Pada tahapan pertama peserta pelatihan diberikan pretest untuk mengetahui persepsinya tentang Pilkada Kota Depok tahun 2020 dan kecenderungannya. Pretest itu terdiri dari beberapa pertanyaan yaitu, *pertama*, pertanyaan tentang apakah mereka mengetahui bahwa pilkada 2020 akan dilaksanakan pada bulan Desember, *kedua*, pertanyaan tentang apakah mereka akan berpartisipasi pada Pilkada Kota Depok 2020, *ketiga*, pertanyaan tentang alasan jika mereka ingin atau khawatir untuk berpartisipasi pada Pilkada Kota Depok 2020. Gambar lembar pretest tersebut adalah sebagai berikut :

Gambar 1 Lembar Pretest Pelatihan Online

The image shows a screenshot of a Google Forms interface. The title of the form is "LEMBAR PRETEST PENDIDIKAN POLITIK DAN BELA NEGARA PADA PEMILIH MILENIAL KOTA DEPOK 2020". Below the title, there is a description: "Deskripsi formulir". The form contains three input fields: "Nama" with a note "Teks jawaban singkat", "Alamat" with a note "Teks jawaban panjang", and "Tempat Tanggal Lahir". The browser's address bar shows a Google URL.

Hasil pretest memperlihatkan 90% responden mengetahui bahwa Pilkada Kota Depok 2020 akan dilaksanakan pada bulan Desember, Namun 60% responden masih khawatir mengikuti pilkada 2020 ditengah covid-19, kekhawatiran tersebut disebabkan oleh ketakutan pemilih milenial terkena covid-19 (60%), 30% menganggap pilkada lebih baik ditunda, 20% menganggap pilkada tidak penting, 20% menganggap kandidat yang ada tidak berperan dalam pembangunan Kota Depok dan sisanya sebanyak 30% menyatakan lainnya. Sedangkan alasan dari responden yang ingin berpartisipasi menyatakan keinginan untuk berpartisipasi karena Menjaga keberlanjutan demokrasi (50%), Menyelesaikan permasalahan covid-19 (30%), Berpartisipasi dalam pembangunan Kota Depok (10%), dan yang menyatakan lainnya sebanyak (10%).

Setelah diberikan pelatihan melalui *google meet* persepsi responden mengalami perubahan. 50% responden masih khawatir untuk mengikuti pilkada 2020, kekhawatiran tersebut disebabkan oleh ketakutan pemilih milenial terkena covid-19 sebanyak 50%, 20% menganggap pilkada lebih baik ditunda, 10% menganggap pilkada tidak penting, 10% menganggap kandidat yang ada tidak berperan dalam pembangunan Kota Depok dan 10% menyatakan lainnya. Berikut adalah gambar lembar posttest pelatihan :

Gambar 2 Lembar Pretest Pelatihan Online

The image shows a Google Forms interface for a pretest. The title of the form is "LEMBAR POSTTEST PENDIDIKAN POLITIK DAN BELA NEGARA PADA PEMILIH MILENIAL KOTA DEPOK 2020". Below the title, there is a "Deskripsi formulir" field. The form contains two main input sections: "Nama" with a "Teks jawaban singkat" (short text) field, and "Alamat" with a "Teks jawaban panjang" (long text) field. The interface also shows standard Google Forms navigation and sharing options.

Persepsi mengenai kekhawatiran akan pelaksanaan pilkada 2020 di kota Depok muncul karena belum jelasnya gambaran masyarakat milenial Kota Depok mengenai mekanisme pilkada ditengah pandemi covid-19, belum kuatnya pengetahuan masyarakat milenial mengenai keamanan pelaksanaan pilkada

dari penularan covid-19 jika dilakukan dengan protokol kesehatan.

Pelatihan politik ini memperkuat pengetahuan milenial mengenai mekanisme pilkada dengan penggunaan protokol yang ketat dengan menggunakan model pemilu Korea Selatan sebagai pembandingnya. Pada Pemilu Korea Selatan penyebaran covid-19 dapat diminimalisir dengan pemilihan yang memberlakukan *social distancing*, serta ketentuan untuk wajib menggunakan masker bagi pemilih. Selain itu pemilih pemula juga diberikan input informasi berupa peta politik Kota Depok yang dinamis. Pemilihan langsung Kepala Daerah di Kota Depok baru dilaksanakan pada tahun 2005, 5 tahun setelah Depok ditetapkan sebagai Kota pada tahun 1999. Berdasarkan analisis terhadap dinamika pilkada Kota Depok, perilaku pemilih Kota Depok sangat cair dan mudah berubah sedangkan perilaku elit parlemennya mudah berkonfrontasi baik di internal parlemen maupun dengan eksekutif. Oleh Karena itu pilkada merupakan momentum penting untuk menciptakan stabilitas politik Kota Depok. Partisipasi politik pilkada akan mampu mengimbangi legitimasi kekuatan parlemen.

Pada konteks relasi politik lokal yang kontraproduktif antara eksekutif dan legislatif, partisipasi politik merupakan kekuatan penyeimbang yang akan mampu mengimbangi kekuatan parlemen dalam pembangunan politik lokal. Pembangunan Lokal Kota Depok akan sangat dipengaruhi oleh partisipasi politik masyarakat yang diawali dari partisipasi politik pada pilkada 2020.

B. Penguatan Nilai Bela Negara

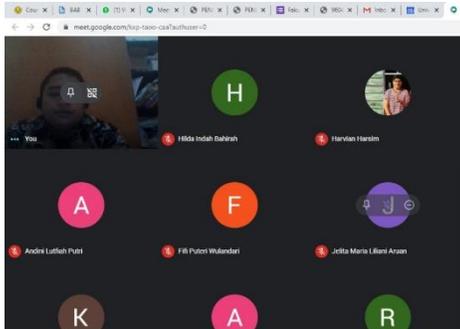
Menurut Sukzaya dalam Darmawan (2013), pembelaan negara atau bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaannya kepada tanah air, beserta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut bela negara merupakan hak, kewajiban, sekaligus tanggung jawab seluruh komponen bangsa tanpa terkecuali. Dengan kata lain bela negara merupakan kewajiban dan tanggung jawab warga negara untuk mempertahankan eksistensi dan kedaulatan negara. Bela negara bukan saja tugas dan tanggung jawab Tentara Republik Indonesia (TNI) tetapi tanggung jawab semua warga

masyarakat.

Penguatan nilai bela negara negara melalui pendidikan bela negara kepada pemilih milenial Kota Depok merupakan motivasi kolektif untuk menguatkan kembali keberanian, kecintaan dan berjuang ditengah ancaman pandemi covid-19. Sehingga para pemilih menjadi percaya diri dan mampu melindungi dirinya dari berbagai potensi penyebaran virus covid-19 pada saat melaksanakan pemilihan. Nilai ini dianggap sangat penting untuk menggerakkan pemilih milenial untuk memilih pada pilkada Kota Depok 2020.

Selain itu, pendidikan ini menumbuhkan daya kekritisan dan seleksi yang konstruktif pada pemilih milenial Kota Depok Dalam pemilihan Kepala Daerah. Berbagai materi mengenai pendidikan politik dan nilai bela negara ini terbukti mampu merubah 10% perspsi pemilih milenial untuk mau berpartisipasi pada pilkada 2020. Berikut adalah gambar pelatihan online tersebut :

Gambar 3 Pelatihan Pendidikan Politik dan Bela Negara
Online



5. Kesimpulan

Pendidikan politik dan bela negara mampu meningkatkan partisipasi politik pemilih milenial khususnya pemilih pemula untuk datang memilih ke TPS pada Pilkada 2020 di Kota Depok. Pendidikan ini dapat memotivasi pemilih milenial dari kalangan pemilih pemula sebesar 10% jika dilakukan dengan baik dan benar.

Pendidikan politik dan bela negara merupakan salah satu solusi bagi penguatan partisipasi pemilih

milenial di Kota Depok pada khususnya dan pemilih milenial di wilayah lainnya pada pilkada 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiharjo M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana
- Creswell, J.W, (2013), *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, edisi ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Darmawan, Cecep. (2013) *Pendidikan Bela Negara dalam Konteks Kemanan Nasional, , Penataan Kebijakan Kemanan Nasional* (Bandung: Dian Cipta,
- Mujani S. dkk. (2012). *Kuasa Rakyat*. Jakarta: Mizan Publika
- Spinali, Antonio (2020), *Menyelenggarakan Pemilu ditengah PAndemi Covid-19 : Ujian Krusial Republik Indonesia*, IDEA INTERNASIONAL